

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Aminuddin Ilmar, *Memaknai Kepemerintahan Yang Baik melalui penerapan prinsip tata kelola dan keabsahan tindakan pemerintahan*, Phinatama Media, Makassar, 2020.
- Anonimous, *What is Democracy*, United Staate Information Agency, 1999.
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH-Ull Press, Yogyakarta, 2003.
- C.F.Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidwick & Jackson Limited, London, 1960.
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia: Prespektif Konstitusional*, Yogyakarta, Total Media, 2009.
- David E. Apter, *Politik Modernisasi*, Gramedia, Jakarta, 1987.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Penerbit Nusa Media, Bandung, 1971, Hal. 225.
- Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.
- Haryono, *Arsitektur Demokrasi Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, 1985.
- Hendry B, Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxfort University Press, New York, 1960.
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Ismail Suny, *Sistim Pemilihan Umum yang menjamin Hak-hak Demokrasi Warga Negara, dalam himpunan karangan dan tulisan Ismail Suny mengenai Pemilihan Umum, dihimpun oleh Harmaily Ibrahim*, 1970.

- Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold, sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, Setara Press, 2019.
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar demokrasi, Edisi Revisi Cetakan Pertama*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Neagara*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*, Setara Press, Malang, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Koirudin, *Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2005.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2012.
- Margarito Kamis, *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia (1966-1993)*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1982.

- Moh, Mahmud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Integrasi Politik Dalam Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokratis (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- P. Antonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Robert Dahl, terjemah A Rahman Zainuddin, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Samuel Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Rineta Cipta, Jakarta, 1994.
- Sirajuddi, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Jawa Timur, 2015.
- Sobirin Melian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Sri Soematri, *Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI dalam Komisi Yudisial, Bungai Rampai Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006.
- Syamsudin Haris et.al., *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Yan Pranadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

## **JURNAL**

Armia, Muhammad Siddiq, M. Deni Fitriadi, and Iqbal Maulana. "Penghapusan Presidential Threshold sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 1.2 (2016).

Dodik Ariyanto, "*Membangun Koalisi yang Efektif Pada Tahun 2014 : Belajar dari Pemilu-Pemilu Sebelumnya*", Jurnal Sekretariat Negara RI No. 27, 2013

Ghoffar, Abdul. "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain." *Jurnal Konstitusi* 15.3 (2018): 480-501.

I Dewa Made Putra Wijaya, "*Mengukur Derajat Demokrasi undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*", *Jurnal IUS*, Vol. II Nomor 6 Desember, 2014.

Mahfud MD, "*Lingkungan Politik Dan Reformasi Di Indonesia Pasca 2014*", Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI No. 28, 2013.

Mardian Wibowo, "*Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015, hlm. 211.

Roni Lukum, "*Pilkada Langsung dan Implikasinya Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Menuju Pembangunan Demokrasi Di Indonesia*", *Jurnal Legalitas*, 2011.

Sholahuddin Al-Fatih, "*Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden*", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2019.

Zukifli Aspan, "*Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 5 No. 1, Januari 2020.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 178.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021